



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR TAHUN 2018





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Secara eksternal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, 7 Maret 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | iv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. KELEMBAGAAN | 12 |
| C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN | 19 |
| D. ISSU-ISSU STRATEGIS..... | 22 |
| E. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 24 |
| F. LANDASAN PENYUSUNAN..... | 25 |
| G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2018..... | 26 |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 28 |
| A. VISI DAN MISI | 30 |
| B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | 31 |
| C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 33 |
| D. PERJANJIAN KINERJA..... | 45 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 50 |
| A. INDIKATOR KINERJA | 50 |
| B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA | 51 |
| C. KINERJA KEUANGAN | 61 |
| IV. PENUTUP | 66 |
| A. SIMPULAN..... | 66 |
| B. SARAN..... | 67 |
| V. LAMPIRAN | |
| LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
| LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN | |
| LAMPIRAN III. PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN | |
| LAMPIRAN IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN | |



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 merupakan LKJ tahun ketiga dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. LKJ Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 melaporkan capaian kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021 dan APBD Tahun 2018.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 menetapkan 492 program dan 1.721 kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja dari 5 misi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 masuk kedalam kategori sangat berhasil.

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian indikator ekonomi adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayagunakan.



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya “good governance” pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya “good governance”. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan disebelah Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km² dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Luas Kecamatan | |
|-----|-------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | Km ² | (%) |
| 1. | Mendahara | 1 | 8 | 911,15 | 16,73 |
| 2. | Mendahara Ulu | 1 | 6 | 381,30 | 7,00 |
| 3. | Geragai | 1 | 8 | 285,35 | 5,24 |
| 4. | Dendang | 1 | 6 | 478,17 | 8,78 |
| 5. | Muara Sabak Barat | 7 | 0 | 251,75 | 4,62 |
| 6. | Muara Sabak Timur | 2 | 10 | 410,28 | 7,53 |
| 7. | Kuala Jambi | 2 | 4 | 120,52 | 2,21 |
| 8. | Rantau Rasau | 1 | 10 | 356,12 | 6,54 |
| 9. | Berbak | 1 | 5 | 194,46 | 3,57 |
| 10. | Nipah Panjang | 2 | 8 | 234,70 | 4,31 |
| 11. | Sadu | 1 | 8 | 1.821,20 | 33,45 |
| | JUMLAH | 20 | 73 | 5.445,00 | 100,00 |

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 bertambah sebanyak 4.743 jiwa dari 213.670 jiwa pada tahun 2017 menjadi 218.413 jiwa pada tahun 2018 atau dengan pertumbuhan 4,01 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2018 sebesar 40,11 jiwa/km² dan sex ratio 105,48.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 dan 2018

| No | Kecamatan | 2017 | | | | | 2018* | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Σ Penduduk | Sex Ratio | Kepadatan (jiwa/km ²) | Laki-laki | Perempuan | Σ Penduduk | Sex Ratio | Kepadatan (jiwa/km ²) |
| 1 | Mendahara | 13.306 | 12.747 | 26.053 | 104 | 28,59 | 13.453 | 12.895 | 26.348 | 104,33 | 3,93 |
| 2 | Mendahara Ulu | 9.001 | 7.932 | 16.933 | 113 | 44,41 | 9.801 | 8.667 | 18.468 | 113,08 | 4,86 |
| 3 | Geragai | 11.965 | 10.483 | 22.448 | 114 | 78,67 | 12.343 | 10.850 | 23.193 | 113,76 | 4,16 |
| 4 | Dendang | 7.641 | 7.354 | 14.995 | 104 | 31,32 | 7.672 | 7.386 | 15.058 | 103,87 | 3,72 |
| 5 | Muara Sabak Barat | 8.535 | 8.064 | 16.599 | 106 | 60,25 | 9.133 | 8.656 | 17.789 | 105,51 | 4,41 |
| 6 | Muara Sabak Timur | 15.672 | 15.476 | 31.148 | 101 | 53,39 | 15.803 | 15.612 | 31.415 | 101,22 | 3,86 |
| 7 | Kuala Jambi | 7.268 | 7.063 | 14.331 | 103 | 127,95 | 7.441 | 7.230 | 14.671 | 102,92 | 4,21 |
| 8 | Rantau Rasau | 11.741 | 11.182 | 22.923 | 105 | 73,71 | 12.122 | 11.545 | 23.667 | 105,00 | 3,71 |
| 9 | Berbak | 5.051 | 4.810 | 9.861 | 106 | 119,00 | 5.082 | 4.842 | 9.924 | 104,96 | 3,58 |
| 10 | Nipah Panjang | 12.881 | 12.585 | 25.466 | 102 | 43,26 | 12.961 | 12.663 | 25.624 | 102,35 | 3,99 |
| 11 | Sadu | 6.262 | 5.905 | 12.167 | 106 | 6,88 | 6.307 | 5.949 | 12.256 | 106,02 | 4,04 |
| Jumlah | | 108.924 | 103.208 | 212.084 | 105 | 39,23 | 112.118 | 106.295 | 218.413 | 105,48 | 4,01 |

*) Angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 mencapai 2,70 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 1,81 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Konstruksi sebesar 13,32 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya pertumbuhan yang negatif pada Kategori Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai kontribusi sebesar -0,31 persen berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Timur. Jika tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 adalah sebesar 6,56 persen.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Konstruksi sebesar 13,32 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,54 persen, kategori Real Estat sebesar 8,80 persen, Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,06 persen, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,80 persen, Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,69 persen, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,47 persen, Kategori Jasa Kesehatan Kegiatan Sosial sebesar 6,07 persen, Kategori Jasa Pendidikan sebesar 6,03 persen, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,40 persen, Kategori Jasa Lainnya sebesar 5,39 persen, Kategori Jasa Perusahaan sebesar 5,32 persen, Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 4,55 persen, Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,64 persen, Kategori Pengadaan Gas dan Listrik sebesar 2,05 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 1,93 persen serta kategori Pertambangan dan penggalian sebesar 0,87 persen.

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

| No. | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,14 | 9,67 | 5,62 | 8,94 | 6,47 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 2,42 | 5,35 | -0,53 | -0,31 | 0,87 |
| 3. | Industri Pengolahan | 10,90 | -0,70 | 2,68 | 1,08 | 1,93 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 13,77 | 6,43 | 7,09 | 5,07 | 2,05 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,25 | 2,85 | 4,53 | 5,11 | 2,64 |
| 6. | Konstruksi | 24,09 | 4,40 | 2,66 | 6,54 | 13,32 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,18 | 11,56 | 13,11 | 12,61 | 7,80 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 8,84 | 7,83 | 3,62 | 7,74 | 8,06 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,50 | 16,19 | 9,57 | 10,27 | 10,54 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 5,57 | 10,46 | 6,05 | 9,91 | 7,69 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,95 | 5,93 | 3,23 | 8,95 | 5,40 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12. | Real Estate | 5,45 | 1,70 | 4,17 | 8.23 | 8.80 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 1,66 | 5,38 | 6,83 | 7.67 | 5.32 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,21 | 12,29 | 9,39 | 5.44 | 4.55 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 3,97 | 2,46 | 5,02 | 8.59 | 6.03 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,24 | 15,26 | 13,43 | 9.76 | 6.07 |
| 17. | Jasa lainnya | 4,67 | 5,45 | 6,78 | 7.83 | 5.39 |
| Laju Pertumbuhan | | 4,57 | 5,81 | 1,87 | 2,70 | 3,13 |

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi .

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2017 tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2017 dengan migas yaitu sebesar Rp 97.064.000,39 juta dan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 77.343.000,37 juta

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

5. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 struktur ekonomi masih berbasis pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencatat sebesar 49,40 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,04 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 7,70 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,26 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,41 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

6. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami kenaikan, begitu juga PDRB perkapita ADHK terus mengalami kenaikan. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

7. Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dihitung oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data laju inflasi Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan data-data termasuk kebutuhan data dalam dokumen perencanaan. Tingkat inflasi Kota Jambi dari tahun 2013-2018 adalah berfluktuasi dengan rata-rata 4,74 persen per tahun. Pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 7,19 persen, namun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan signifikan terhadap tingkat inflasi sebesar 2,95 persen di tahun 2017, tetapi di tahun 2018 inflasi naik kembali menjadi 3,02 persen atau tumbuh 97,70 persen. Inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga.

8. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 - 2017 menunjukkan angka yang relative stabil. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini pada tahun 2017 sebesar 0.28 sama pada tahun 2015 sebesar 0.28 . Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak dari posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna.



B. KELEMBAGAAN

1. Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semula diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah "*Miskin Struktur*



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kaya Fungsi”, maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18 Tahun 2014 menerapkan prinsip “Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi”.

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

| MATERI | PP No 18 Tahun 2016 | PP No 41 Tahun 2007 |
|--------------------------------|--|---|
| PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH | <ul style="list-style-type: none">❖ Pengelompokan perangkat daerah:<ul style="list-style-type: none">▪ Setda;▪ Set DPRD;▪ Inspektorat;▪ Dinas;▪ Badan;▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota)▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan :❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi)❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memebreikan layanan langsung kepada masyarakat.❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah | <ul style="list-style-type: none">❖ Pengelompokan perangkat daerah:<ul style="list-style-type: none">▪ Setda;▪ Set DPRD;▪ Inspektorat▪ Lemtekda.▪ Kecamatan (khsusus kab/kota)❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor. |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| MATERI | PP No 18 Tahun 2014 | PP No 41 Tahun 2007 |
|-------------------------|---|--|
| TIPOLOGI | <ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat Daerah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang.❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelompokkan menjadi :<ul style="list-style-type: none">▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A.▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah tipe B▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang. | <ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan.❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah. |
| PEMETAAN URUSAN | <ul style="list-style-type: none">❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung.❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan | <ul style="list-style-type: none">❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung.❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah. |
| JUMLAH PERANGKAT DAERAH | <ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat Daerah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah.❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4.❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan.❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah. | <ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan.❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7. |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagiandari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujudkan sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi "siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya". Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
- k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi daerah adalah:

- a. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa.
- b. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
- c. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai.
- d. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.
- e. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun.
- f. masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.

2. Permasalahan Perekonomian Daerah;

- a. Jumlah persentase Penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.
- b. Investasi Daerah belum maksimal pengembangannya karena Daya dukung infrastruktur terbatas.
- c. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki.
- d. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena nilai tukar petuni (NTP) masih rendah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- e. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain.
- f. Peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah.
- g. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit.
- h. Masih adanya Infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi.
- i. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
- j. Produktivitas hasil pertanian masih rendah akibat mutu input yang digunakan petani rendah.
- k. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
- l. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung potensi pariwisata masih minim.

3. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM

- a. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik.
- b. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM Tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
- c. Wajib belajar 12 tahun belum optimal.
- d. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah.
- e. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya.
- f. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu belum berkualitas.
- g. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas.
- h. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- i. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan.
- j. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah.
- k. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

4. Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan Keamanan

- a. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang terpadu dengan dunia pariwisata masih terbatas.
- b. Pengembangan nilai-nilai budaya (tradisi) dan kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah masih sangat terbatas.
- c. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu saja.
- d. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.
- e. Masih terdapat konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

- a. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada Perangkat Daerah masih rendah.
- b. Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum optimal.
- c. Belum optimalnya peran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan.
- d. Belum optimalnya peran sistem e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terutama dalam mentaati peraturan daerah.
- f. Derajat desentralisasi fiskal daerah masih sangat rendah akibatnya ketergantungan pada APBN amat tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- g. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum maksimal karena potensi belum optimal digunakan.
- h. Pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan PAD belum optimal dilakukan.
- i. Masih terbatasnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam Perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa.
- j. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan capaian opini laporan keuangan daerah belum optimal.

D. ISSU-ISSU STRATEGIS

1. Isu Strategis terkait dengan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

- a) Kondisi Infrastruktur dasar jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik masih terbatas yang perlu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas.
- b) Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian belum memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

2. Isu Strategis Perekonomian Daerah

- a) Kecenderungan bertambahnya penduduk miskin setiap tahun didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk nelayan, yang diakibatkan oleh masih rendahnya NTP yang perlu untuk ditingkatkan.
- b) Keberadaan UMKM dan Koperasi belum dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- c) Potensi Pariwisata Daerah belum tergali karena terbatasnya sarana prasarana pendukung yang perlu untuk ditingkatkan.

3. Isu Strategis terkait dengan peningkatan SDM

- a) Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan dan kesehatan masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) prestasi olah raga daerah masih rendah dikarenakan masih rendahnya budaya olahraga ditingkat masyarakat dan masih



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

terbatasnya peran swasta dalam pengembangan kegiatan olahraga .

- c) peran perempuan dalam kegiatan pembangunan masih terbatas dibanding dengan laki-laki sehingga perlu ditingkatkan pengarusutamaan gender dalam aspek bidang kehidupan.
- d) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan aparatur daerah/desa dan para pencari kerja masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing.

4. Isu-isu Strategis yang terkait dengan Budaya dan politik

- a) Adanya kecenderungan mulai melunturnya tradisi dan budaya daerah di masyarakat sehingga perlu pertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah.
- b) Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik Masih rendah sehingga perlu peningkatan pendidikan politik masyarakat.
- c) Masih adanya konflik sengketa lahan yang belum dapat diselesaikan sehingga perlu dilakukan mediasi.

5. Isu-isu strategis terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

- a) Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa masih belum memuaskan, perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penerapan e-Government, penguasaan peraturan dan pengawasan internal.
- b) Masih rendahnya kontribusi PAD dan ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga perlu digali dan ditingkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
- c) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan opini laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

6. Isu-isu strategis Global, Nasional dan Regional

- a) Letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis sangat strategis, karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- b) Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dengan adanya Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Gambut, Tahura, dapat dipastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sumber paru-paru dunia
 - c) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan gas dan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - d) Masih terdapat konflik sengketa lahan antara Penyelesaian Batas Kabupaten dan batas Desa dengan Taman Nasional Berbak merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran, tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2018.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2016

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas konsiderandum umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isu strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2018 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2016-2021 dan Rencana Kinerja 2018. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2018.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2016. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

A. VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **‘Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)’**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

3. Delapan Pilar Utama

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas keteringgalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan;
4. Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat;
5. Meningkatkan daya saing Produksi perikanan;
6. Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah;
7. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara;
8. Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing;
9. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas;
10. Meningkatkan sarana pendidikan dasar;
11. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

13. Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan masyarakat;
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi;
15. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya;
16. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat;
17. Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat;
18. Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
19. Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa;
20. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis;
21. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
5. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
6. Meningkatnya produksi tanaman padi;
7. Meningkatnya produksi tanaman palawija;
8. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan;
9. Meningkatnya Populasi Ternak;
10. Meningkatnya produksi daging;
11. Meningkatnya pendapatan petani;
12. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat;
13. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
14. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

15. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM;
16. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
17. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi;
18. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
19. Meningkatnya sarana pendidikan dasar;
20. meningkatnya status kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
22. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan;
24. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
25. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat;
26. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat;
27. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum;
28. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran;
29. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat;
30. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas;
31. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik;
32. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa;
33. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
34. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

- a) Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
- b) Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat;
- c) Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
- d) Perbaikan kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
- e) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
- f) peningkatan produksi tanaman padi;
- g) peningkatan produksi tanaman palawija;
- h) peningkatan produksi tanaman buah-buahan;
- i) Peningkatan Populasi Ternak;
- j) Peningkatan produksi daging;
- k) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- l) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- m) Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum, Kolam dan air laut);
- n) Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;
- o) Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh SKIM pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas;
- p) Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing;
- q) Peningkatan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa;
- r) Pengembangan kawasan situs cagar budaya;
- s) Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
- t) Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan Pegelaran / event pariwisata;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- u) Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- v) Peningkatan mutu pendidikan dasar;
- w) Peningkatan sarana pendidikan dasar;
- x) Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat;
- y) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- z) Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat;
- aa) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- bb) Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat;
- cc) Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- dd) Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
- ee) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;
- ff) Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK;
- gg) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK;
- hh) Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan;
- ii) Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya;
- jj) Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
- kk) Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran;
- ll) Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan;
- mm) Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda;
- nn) Peningkatan kemampuan kafilah;
- oo) Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas
- pp) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance);
- qq) Peningkatan manajemen pemerintahan desa;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- rr) Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
- ss) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan;
- tt) Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2016 – 2021 adalah :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah.
- c) Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 – 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

- 1) Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru;
- 2) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
- 3) Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung;
- 4) Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik;
- 5) Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik;
- 6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang;
- 7) Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh;
- 8) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air;
- 9) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi;
- 10) Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija;
- 11) Mengembangkan komoditas buah-buahan;
- 12) Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak;
- 13) Meningkatkan produksi daging;
- 14) Meningkatkan Pendapatan Petani;
- 15) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan;
- 16) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut;
- 17) Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan;
- 18) Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat;
- 19) Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 20) Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin;
- 21) Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- 22) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar;
- 23) Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya;
- 24) Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan;
- 25) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata;
- 26) Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi;
- 27) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- 28) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- 29) Memperkuat upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup;
- 30) Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas);
- 31) Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas;
- 32) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama;
- 33) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan;
- 34) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- 35) Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- 36) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB;
- 37) Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak;
- 38) Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan;
- 39) Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja;
- 40) Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 41) Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni;
- 42) Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;
- 43) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 44) Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- 45) Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah;
- 46) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah;
- 47) Meningkatkan TC MTQ;
- 48) Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia;
- 49) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas;
- 50) Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
- 51) Melaksanakan pemilihan kepala desa;
- 52) Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu;
- 53) Meningkatkan capaian penilaian SAKIP;
- 54) Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah;
- 55) Peningkatan tindaklanjut temuan;
- 56) Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
- 57) Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|--|---|
| VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT) | | | |
| MISI I “Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” | | | |
| Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas | Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas | Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas | Membangun Jalan dan Jembatan Ke akses Sentra-sentra Produksi dan pusat pertumbuhan baru Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Mendukung Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak dan Ujung Jabung |
| | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan | Peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan produksi pertanian masyarakat | Membangun Jaringan irigasi Dalam Kondisi Baik Memelihara dan Meningkatkan Jaringan irigasi dalam kondisi baik |
| | Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten | Pemanfaatan dan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan tata ruang |
| | Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk | Perbaiki kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk | Meningkatkan penanganan penanggulangan kawasan kumuh |
| Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air | Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air | Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan air | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan air |
| MISI II “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)” | | | |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan | Meningkatnya produksi tanaman padi | peningkatan produksi tanaman padi | Mengembangkan intensifikasi Tanaman Padi |
| | Meningkatnya produksi tanaman palawija | peningkatan produksi tanaman palawija | Mengembangkan intensifikasi Tanaman Palawija |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|--|
| | Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan | peningkatan produksi tanaman buah-buahan | Mengembangkan komoditas buah-buahan |
| | Meningkatnya Populasi Ternak | Peningkatan Populasi Ternak | Meningkatkan populasi ternak melalui budidaya ternak |
| | Meningkatnya produksi daging | Peningkatan produksi daging | Meningkatkan produksi daging |
| | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Peningkatan Kesejahteraan Petani | Meningkatkan Pendapatan Petani |
| Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat | Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat | Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan |
| Meningkatkan daya saing Produksi perikanan | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya | Peningkatan Produksi Perikanan (Perairan umum, Kolam dan air laut) | Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan air laut |
| | Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan | Peningkatan hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan | Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan Meningkatkan Pola Konsumsi Ikan di Masyarakat |
| Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah | Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM | Meningkatkan jumlah dan kualitas Koperasi/USP-Koperasi guna memperoleh Skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas | Memberikan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM Memberikan Bantuan Hibah Koperasi Untuk Modal Kerja Masyarakat Miskin |
| | | Peningkatan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing | Membina dan memberdayakan Usaha Industri Kecil dan Menengah |
| | | Peningkatan stabilitas dan Akses Pasar serta Jaringan Distribusi Barang dan Jasa | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar |
| | | | |
| Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara | Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing | Pengembangan kawasan situs cagar budaya | Memelihara dan mengembangkan situs cagar budaya |
| | | Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing | Meningkatkan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan |
| | | Peningkatan Pemasaran Objek Pariwisata Daerah melalui Promosi dan | Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Pada setiap segmen pasar pariwisata |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
|--|--|---|--|---|
| | | Pegelaran / event pariwisata | | |
| Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing | Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi | Peningkatan atlet yang berkualitas dan berprestasi Pada even Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional | Meningkatkan Atlet yang berdaya saing dan berprestasi | |
| MISI III "Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK" | | | | |
| Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat | Peningkatan mutu pendidikan dasar | Pemerataan dan perluasan akses pendidikan | |
| Meningkatkan sarana pendidikan dasar | Meningkatnya sarana pendidikan dasar | Peningkatan sarana pendidikan dasar | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar | |
| Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan | meningkatnya status kesehatan masyarakat | Peningkatan status kesehatan dan gizi Masyarakat | Menguatkan upaya kesehatan keluarga melalui pendekatan siklus hidup | |
| | | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas | Peningkatan mutu pelayanan kesehatan | Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) |
| | | | Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat | Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas |
| | | | Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan | Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama |
| | | Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan di tingkat rujukan | | |
| | | Peningkatan cakupan layanan air bersih pada masyarakat | Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat | |
| | | Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk hidup bersih dan sehat | Penguatan Promosi Kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat | |
| Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi | Menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan jumlah penduduk dengan potensi wilayah | Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB | |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|--|---|
| wilayah | wilayah | | |
| Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan | Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak | Meningkatkan Pembangunan melalui pemberdayaan Gender dan Anak |
| Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEK serta kemudahan mendapat informasi | Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK | Pengembangan Fasilitas berbasis IPTEK | Mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa/Kelurahan |
| | | Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi berbasis IPTEK | Menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja |
| MISI IV "Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif" | | | |
| Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya | Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat | Pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan | Memberikan bantuan usaha kepada pengurus mesjid kecamatan untuk dana abadi |
| | Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat | Pembangunan sarana dan fasilitas seni budaya | Memberikan bantuan alat kesenian ke sanggar-sanggar seni |
| Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat. | Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum | Peningkatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat | Meningkatkan pemantauan dan pemetaan potensi konflik serta meningkatnya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat |
| | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran | Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran |
| Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada | Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya | Peningkatan koordinasi FKUB, para tokoh agama dan tokoh aliran kepercayaan | Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|--|
| masyarakat | bangsa terhadap masyarakat | Peningkatan rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa patriotisme dikalangan pelajar dan generasi muda | Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah |
| | | Peningkatan kemampuan kafilah | Meningkatkan TC MTQ |
| | | | Peningkatan kemampuan anak sholeh Indonesia |
| Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas | Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas | Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas | Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas |
| MISI V “Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis” | | | |
| Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa | Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik | Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Yang Baik (Good Governance) | Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa |
| Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis | Meningkatnya manajemen pemerintahan desa | Peningkatan manajemen pemerintahan desa | Melaksanakan pemilihan kepala desa |
| Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah | Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah | Meningkatkan Nilai Investasi Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu |
| | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan | Meningkatkan capaian penilaian SAKIP |
| | | | Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah |
| | | | Peningkatan tindak lanjut temuan |
| | | | Meningkatkan SDM yang profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--------|---------|--|--|
| | | Peningkatan konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya | Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu |

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.321.625.969,76,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 537.900.064.661,82,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 662.421.561.307,94,-

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2016 |
|--|---|---|-------------|
| MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | |
| 1. | Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas | Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap | 80,07% |
| | | persentase jembatan dalam kondisi baik (%) | 29,58% |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 74,45% |
| 3. | Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten | Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang | 100% |
| 4. | Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk | Persentase pengurangan luas kawasan kumuh | 5,11% |
| 5. | Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air | Persentase ketersediaan Terminal Tipe C | 9,09% |
| | | Persentase Dermaga dalam kondisi baik | 45% |
| | | Persentase kecelakaan darat | 0,13% |
| | | Persentase kecelakaan air | 0,05% |
| MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM) | | | |
| 1. | Meningkatnya produksi tanaman padi | Provititas tanaman padi (ton/Ha) | 4,20 Ton/Ha |
| 2. | Meningkatnya produksi tanaman palawija | Provititas Tanaman jagung (ton/Ha) | 7,0 Ton/Ha |
| 3. | Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan | Provititas tanaman semangka (ton/Ha) | 8,0 Ton/Ha |
| 4. | Meningkatnya Populasi Ternak | Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor) | 4.089.936 ekor |
| 5. | Meningkatnya produksi daging | Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg) | 240.642 Kg |
| 6. | Meningkatnya pendapatan petani | Nilai Tukar Petani / NTUP | 99,3% |
| 7. | Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 84,0% |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 79,8% |
| | | Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari) | 2.161 (Kkal/Kap/Hari) |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| 8. | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya | 2,04% |
| | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 0,4% |
| 9. | Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan | Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%) | 0,47% |
| | | Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita) | 34,9 Kg/Kapita |
| 10. | Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM | Jumlah IKM yang produktif | 1000 IKM |
| | Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing | Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan | 2,0% |
| 11. | Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi | Peringkat POPDA | Peringkat 4 |
| MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat | APM SD /Sederajat | 97,11% |
| | | APM SMP /Sederajat | 84,26% |
| | | APK SD /Sederajat | 112,95% |
| | | APK SMP /Sederajat | 92,31% |
| | | Angka Melek Huruf | 97,38% |
| | | Angka rata-rata lama sekolah | 7 Th |
| | | Harapan Lama Sekolah | 11,34 Th |
| 2. | Meningkatnya sarana pendidikan dasar | Persentase Rasio Ideal rombel SD | 89,25% |
| | | Persentase Rasio Ideal rombel SMP | 98,11% |
| 3. | meningkatnya status kesehatan masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 65,55 Th |
| | | Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH) | 21,00 / 1.000 KH |
| | | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH) | 21,50 / 1.000 KH |
| | | Jumlah Kematian Ibu | 5 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | |
|---|--|---|----------|
| | | Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) | 0,56% |
| | | Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+ | 80% |
| | | Prevalensi Penyakit Kusta | 3,5/1000 |
| 4. | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas | Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan | 9 |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 40% |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin | 23,0% |
| | | Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi | 47,00% |
| 5. | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah | Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 0,78% |
| 6. | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan | Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi | 60% |
| | | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 60% |
| | | Indeks Pembangunan Gender | 61,31 |
| 7. | Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK | Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet | 80% |
| | | Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek | 75% |
| MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF | | | |
| 1. | Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat | Indeks Kebebasan Berkeyakinan | 93,85% |
| 2. | Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni | 1 |
| 3. | Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum | Indeks Demokrasi Indonesia | 76% |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | |
|----|--|--|-----|
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran | persentase cakupan layanan kebakaran | 90% |
| 5. | Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat | Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi | 2 |
| 6. | Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas | Persentase penyelesaian sengketa lahan | 80% |

MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS

| | | | |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B |
| 2. | Meningkatnya manajemen pemerintahan desa | Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 75,34% |
| 3. | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah | Nilai Investasi (dalam Juta rupiah) | 33.075 |
| 4. | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien | Nilai SAKIP | B |
| | | Opini BPK | WTP |
| | | Penyelesaian tindak lanjut temuan | 95% |
| | | Predikat Nilai EPPD | Tinggi |
| | | Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD | 84% |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, indikator kinerja masih bersifat parsial dan kumulatif sehingga



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat komulatif

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

| No | JUMLAH NILAI | KATEGORI |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 85 % | Sangat berhasil |
| 2 | 70 % s.d kurang dari 85 % | Berhasil |
| 3 | 55 % s.d kurang dari 70 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2018 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

| | |
|---|--|
|  | MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN |
|---|--|

Untuk mencapai Misi 1 “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**” pada tahun 2018 telah dilaksanakan 5 (lima) sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
- 2) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan.
- 3) Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten.
- 4) Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk.
- 5) Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI | CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2017 |
|-----|--|---|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas | Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap | 80,07% | 72,71% | 90,80% |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---------|
| | guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas | persentase jembatan dalam kondisi baik (%) | 29,58% | 30,29% | 102,4% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 74,45% | 77,56% | 104,18% |
| 3. | Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten | Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk | Persentase pengurangan luas kawasan kumuh | 5,11% | 5,16% | 100,98% |
| 5. | Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air | Persentase ketersediaan Terminal Tipe C | 9,09% | 0% | 0% |
| | | Persentase Dermaga dalam kondisi baik | 45% | 43% | 95,56% |
| | | Persentase kecelakaan darat | 0,11% | 0,19% | 57,89% |
| | | Persentase kecelakaan air | 0,05% | 0,087% | 57% |

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 5 sasaran yang didukung dengan 9 Indikator Kinerja Utama.

Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2018 masuk dalam kategori sangat berhasil.

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur harus lebih konsisten dalam upaya pencapaian misi pertama ini.



| | |
|---|--|
|  | <p>MISI 2 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM)</p> |
|---|--|

Untuk mencapai Misi 1 “**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agrobisnis, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Investasi Industri, Kepariwisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Maritim)**” pada tahun 2018 telah dilaksanakan 11 (sebelas) sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya produksi tanaman padi.
- 2) Meningkatnya produksi tanaman palawija.
- 3) Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan.
- 4) Meningkatnya Populasi Ternak.
- 5) Meningkatnya produksi daging.
- 6) Meningkatnya pendapatan petani.
- 7) Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat.
- 8) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya.
- 9) Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan.
- 10) Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM serta Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing.
- 11) Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI | CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2017 |
|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya produksi tanaman padi | Provitas tanaman padi (ton/Ha) | 4,20 Ton/Ha | 4,32 Ton/Ha | 102,9% |
| 2. | Meningkatnya produksi tanaman palawija | Provitas Tanaman jagung (ton/Ha) | 7 Ton/Ha | 6,8 Ton/Ha | 97,43% |
| 3. | Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan | Provitas tanaman semangka (ton/Ha) | 8,25 Ton/Ha | 20,9 Ton/Ha | 253,33% |
| 4. | Meningkatnya Populasi Ternak | Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor) | 4.089.936 ekor | 4.123.519 ekor | 100,8% |
| 5. | Meningkatnya produksi daging | Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg) | 240.642 Kg | 234.802,62 Kg | 97,6% |
| 6. | Meningkatnya pendapatan petani | Nilai Tukar Petani / NTUP | 99,30% | 104,73% | 105,47% |
| 7. | Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 84,0% | 94,8% | 112,9% |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 79,8% | 94,8% | 118,8% |
| | | Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari) | 2.161 (Kkal/Kap/Hari) | 2.371 (Kkal/Kap/Hari) | 110% |
| 8. | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya | 2,04% | 40,07% | 1964,2% |
| | | Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap | 0,40% | 0,34% | 85,0% |
| 9. | Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan | Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%) | 0,47% | 0,30% | 74,64% |
| | | Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita) | 34,9 Kg/Kapita | 39,51 Kg/Kapita | 113,21% |
| 10. | Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM | Jumlah IKM yang produktif | 1.000 IKM | 668 IKM | 66,80% |
| | Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing | Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan | 2,0% | 1,8% | 90,0% |
| 11. | Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi | Peringkat POPDA | Peringkat 5 | Peringkat 7 | 57,14% |

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 11 sasaran dan 16 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100%.

| | |
|---|--|
|  | MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK |
|---|--|

Untuk mencapai Misi 3 “**Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan Penerapan Iptek**” pada tahun 2018 telah dilaksanakan 7 (sebelas) sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- 2) Meningkatnya sarana pendidikan dasar.
- 3) Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
- 4) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
- 5) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah.
- 6) Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan.
- 7) Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI | CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2017 |
|-----|---|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat | APM SD /Sederajat | 97,11% | 97,51% | 100,41% |
| | | APM SMP /Sederajat | 84,26% | 84,26% | 100% |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | |
|----|--|--|----------------|----------------|---------|
| | | APK SD /Sederajat | 112,95% | 111,76% | 98,95% |
| | | APK SMP /Sederajat | 92,31% | 98,46% | 106,66% |
| | | Angka Melek Huruf | 97,38% | 98,49% | 101,14% |
| | | Angka rata-rata lama sekolah | 7 Th | 6,38 Th | 97% |
| | | Harapan Lama Sekolah | 11,34 Th | 11,80 Th | 104,1% |
| 2. | Meningkatnya sarana pendidikan dasar | Persentase Rasio Ideal rombel SD | 89,25% | 90,25% | 101% |
| | | Persentase Rasio Ideal rombel SMP | 98,11% | 100% | 102% |
| 3. | meningkatnya status kesehatan masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 65,55 Th | 65,69 Th | 100,2% |
| | | Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH) | 21,00/1.000 KH | 21,99/1.000 KH | 95,49% |
| | | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH) | 21,50/1.000 KH | 21,92/1.000 KH | 98,08% |
| | | Jumlah Kematian Ibu | 5 | 4 | 125% |
| | | Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) | 0,56% | 0,63% | 112,50% |
| | | Cakupan penemuan dan panganan TBParu BTA+ | 80% | 58,30% | 73% |
| | | Prevalensi Penyakit Kusta | 2,5 /1000 | 2,0 /1000 | 80% |
| 4. | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas | Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan | 9 | 10 | 111% |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 40% | 55% | 138% |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin | 23,0% | 21,9% | 95,3% |
| | | Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi | 47,00% | 64,70% | 137,7% |
| 5. | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah | Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 0,78% | 0,78% | 100% |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--------|
| 6. | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan | Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi | 60% | 60% | 100% |
| | | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 60% | 55,64% | 93% |
| | | Indeks Pembangunan Gender | 61,31% | 60% | 98% |
| 7. | Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK | Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet | 80% | 85% | 106% |
| | | Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek | 75% | 80% | 106,7% |

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 7 sasaran dan 26 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2018 melebihi target. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100% meskipun ada beberapa indicator yang masih harus dioptimalkan.

| | |
|---|--|
|  | MISI 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF |
|---|--|

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

- 1) Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat.
- 2) Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat.
- 3) Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
- 4) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran.
- 5) Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 6) Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI | CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2017 |
|-----|--|---|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat | Indeks Kebebasan Berkeyakinan | 93,85% | 87,69% | 93,44% |
| 2. | Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum | Indeks Demokrasi Indonesia | 76% | 90,86% | 120% |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran | persentase cakupan layanan kebakaran | 90% | 100% | 111,11% |
| 5. | Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat | Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi | 2 | 1 | 100% |
| 6. | Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas | Persentase penyelesaian sengketa lahan | 80% | 100% | 125% |

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 6 sasaran dengan 6 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih angka sempurna karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2018 meraih angka sebesar rata-rata 100 %.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS

Untuk mencapai Misi 5 “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis*” pada tahun 2018 telah dilaksanakan 4 (empat) sasaran utama yaitu:

- 1) Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik.
- 2) Meningkatnya manajemen pemerintahan desa.
- 3) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- 4) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI | CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2017 |
|-----|--|--|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | 100% |
| 2. | Meningkatnya manajemen pemerintahan desa | Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 75,34% | 100% | 133% |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | |
|----|--|--|--------|---------|----------|
| 3. | Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah | Nilai Investasi (dalam Juta rupiah) | 33.075 | 760.848 | 2300,37% |
| 4. | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien | Nilai SAKIP | B | CC | 90% |
| | | Opini BPK | WTP | WTP | 100% |
| | | Penyelesaian tindak lanjut temuan | 92% | 100% | 105% |
| | | Predikat Nilai EPPD | Tinggi | Tinggi | 100% |
| | | Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD | 84% | 84% | 100% |

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal capaian kinerja tahun 2018 pada Misi 5 masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedangkan rata-rata capaian kinerja misi kelima tahun 2018 diatas sebesar 100% dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 2300,37% pada Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD.

C. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 1.083.172.878.144,06 dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.093.501.080.092,57 atau terealisasi sebesar 100,95%, dapat jelas sebagai berikut :

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 45.546.397.039,00 | 49.607.553.501,16 | 112,17 |
| 2 | Pendapatan Dana | 907.092.822.062,85 | 905.488.095.447,00 | 99,82 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | Perimbangan | | | |
| 3 | Lain-lain Pendapatan yang sah | 130.533.659.042,21 | 138.405.431.144,41 | 106,03 |
| | Total | 1.083.172.878.144,06 | 1.093.501.080.092,57 | 100,95 |

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

| No | Pendapatan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Pajak Daerah | 17.453.350.000,00 | 17.711.538.820,42 | 101,48 |
| 2 | Retribusi Daerah | 1.698.020.000,00 | 1.174.130.455,14 | 69,15 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 6.300.000.000,00 | 6.393.385.881,15 | 101,48 |
| 4 | Lain – Lain PAD yang sah | 20.095.027.039,00 | 24.328.498.344,45 | 121,07 |
| | Jumlah | 45.546.397.039,00 | 49.607.553.501,16 | 108,92 |

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2018 penerimaan yang ditargetkan sebesar 1.083.172.878.144,06 melebihi target Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini, disumbang oleh seluruh pendapatan sebesar 1.093.501.080.092,57 atau 100,95%. realisasi pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Pendapatan Dana Perimbangan

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

| No | Pendapatan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak | 156.265.318.062,85 | 168.165.542.361,00 | 107,62 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 540.400.531.000,00 | 540.400.531.000,00 | 100,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 210.426.973.000,00 | 196.922.022.086,00 | 93,58 |
| Jumlah | | 907.092.822.062,85 | 905.488.095.447,00 | 99,82 |

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi dana perimbangan selama tahun 2018 tidak mencapai target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 907.092.822.062,85,- Pendapatan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi Rp. 905.488.095.447,00,- atau 99,82%

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

| No | Pendapatan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | Hibah | 0,00 | 229.615.000,00 | - |
| 2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya | 35.899.831.042,21 | 43.732.150.448,41 | 121,82 |
| 3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DPDF) | 89.053.828.000,00 | 88.863.665.696,00 | 99,79 |
| 4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 5.580.000.000,00 | 5.580.000.000,00 | 100,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Jumlah | 130.533.659.042,21 | 138.405.431.144,41 | 106,03 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 537.900.064.661,82 | 516.984.927.575,00 | 96,11 |
| 2 | Belanja Langsung | 662.421.561.307,94 | 616.482.085.076,00 | 93,06 |
| | Total | 1.200.321.625.969,76 | 1.133.467.012.651,00 | 94,43 |

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi belanja sebesar Rp. 1.133.467.012.615,00,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.321.625.969,97 atau terealisasi sebesar 94,43%, dimana belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 516.984.927.575,00 atau 96,11% dan belanja langsung sebesar Rp. 616.482.085.076,00 atau 93,06 %.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

| NO | PEMBIAYAAN | ANGGARAN/TARGET | REALISASI |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 119.148.747.825,70 | 119.148.747.825,70 |
| | - SILPA | 119.148.747.825,70 | 119.148.747.825,70 |
| | - Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| | - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| | - Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | - Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | - Pembentukan Dana Cadangan | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | - Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | - Badan Usaha Kelompok/Anggota Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 |
| | - Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pembiayaan Netto | 117.148.747.825,70 | 117.148.747.825,70 |

*) Sumber : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018, data

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2018, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 119.148.747.825,70 terealisasi sebesar Rp. 119.148.747.825,70 atau 100 %, sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 100% sehingga pembiayaan netto tahun 2018 sama dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 117.148.747.825,70 terealisasi sebesar Rp. 117.148.747.825,70 atau 100 %.



BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2018 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders*, antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penyesuaian dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO, SE.



LAMPIRAN I



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2018

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2017 |
|--|--|---|-----------------------|
| MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | |
| 1. | Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas Guna Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | 80,07% |
| | | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (%) | 29,58% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Menunjang Kedaulatan Pangan | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%) | 74,45% |
| 3. | Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai RTRW Kabupaten | Persentase Kesesuaian Pembangunan Terhadap Tata Ruang | 100% |
| 4. | Mengurangi Kawasan Kumuh Pada Permukiman Padat Penduduk | Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh | 5,11% |
| 5. | Meningkatnya Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air | Persentase Ketersediaan Terminal Tipe C | 9,09% |
| | | Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik | 45% |
| | | Persentase Penurunan Kecelakaan Darat | 0,11% |
| | | Persentase Penurunan Kecelakaan Air | 0,05% |
| MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM) | | | |
| 1. | Meningkatnya Produksi Tanaman Padi | Provitaa Tanaman Padi (Ton / Ha) | 4,20 Ton/Ha |
| 2. | Meningkatnya Produksi Tanaman Palawija | Provitaa Tanaman Jagung (Ton / Ha) | 7,0 Ton/Ha |
| 3. | Meningkatnya Produksi Tanaman Buah-buahan | Provitaa Tanaman Semangka (Ton / Ha) | 8 Ton/Ha |
| 4. | Meningkatnya Populasi Ternak | Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Ekor) | 4.089.936 ekor |
| 5. | Meningkatnya Produksi Daging | Jumlah Peningkatan Daging Ruminansia (Kg) | 240.642 Kg |
| 6. | Meningkatnya Pendapatan Petani | Nilai Tukar Petani / NTUP | 99,3 |
| 7. | Meningkatnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 84,0% |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 79,8% |
| | | Konsumsi Energi (Kkal / Kapita / Hari) | 2.161 (Kkal/Kap/Hari) |
| 8. | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 2,04% |
| | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 0,4% |
| 9. | Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan Masyarakat dan Tingkat Konsumsi Ikan | Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%) | 0,47% |
| | | Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg / Kapita) | 34,9 Kg/Kapita |
| 10. | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Skim Pembiayaan Yang Mudah, Cepat dan Terjangkau Bagi Koperasi dan UMKM Meningkatnya Destinasi Pariwisata Yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing | Jumlah IKM Yang Produktif | 1.000 IKM |
| | | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2,0% |
| 11. | Meningkatnya Atlet Yang Berkualitas dan Berprestasi | Peringkat POPDA | peringkat 4 |
| MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPTEK | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | APM SD / Sederajat | 97,11% |
| | | APM SMP / Sederajat | 84,26% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2017 |
|--|--|---|----------------|
| | | APK SD / Sederajat | 112,95% |
| | | APK SMP / Sederajat | 92,31% |
| | | Angka Melek Huruf | 97,38% |
| | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7 Th |
| | | Harapan Lama Sekolah | 11,34 Th |
| 2. | Meningkatnya Sarana Pendidikan Dasar | Persentase Rasio Ideal Rombel SD | 89,25% |
| | | Persentase Rasio Ideal Rombel SMP | 98,11% |
| 3. | Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 65,55 Th |
| | | Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) | 21,00/1.000 KH |
| | | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) | 21,50/1.000 KH |
| | | Jumlah Kematian Ibu | 5 |
| | | Prevalensi Kekurangan Gizi (Standar WHO, 2005) | 0,56% |
| | | Cakupan Penemuan dan Penganan TBParu BTA+ | 80% |
| | | Prevalensi Penyakit Kusta | 3 /1000 |
| 4. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas | Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan | 9 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 40% |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | 23,0% |
| | | Persentase Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi | 47,00% |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Jumlah Penduduk Dengan Potensi Wilayah | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 0,78% |
| 6. | Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan Diberbagai Bidang Kehidupan | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Usaha Ekonomi | 60% |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 60% |
| | | Indeks Pembangunan Gender | 61,31 |
| 7. | Tersedianya Akses Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi, Pengetahuan dan Keterampilan Berbasis IPTEK | Cakupan Desa / Kelurahan Terhadap Akses Internet | 80% |
| | | Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis IPTEK | 75% |
| MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDUSIF | | | |
| 1. | Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Masyarakat | Indeks Kebebasan Berkeyakinan | 93,85 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Seni Budaya Masyarakat | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni | 1 |
| 3. | Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik dan Hukum | Indeks Demokrasi Indonesia | 76% |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Dari Bencana Kebakaran | Persentase Cakupan Layanan Kebakaran | 90% |
| 5. | Meningkatnya Pengamalan Ideologi Pancasila, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Terhadap Masyarakat | Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi | 2 |
| 6. | Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Lahan dan Tapal Batas | Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan | 80% |
| MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS | | | |
| 1. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang Melayani Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2017 |
|-----|--|--|-------------|
| 2. | Meningkatnya Manajemen Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik | 75,34% |
| 3. | Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Kondisi dan Karakteristik Daerah | Nilai Investasi (Dalam Juta Rupiah) | 33.075 |
| 4. | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja serta Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efisien | Nilai SAKIP | B |
| | | Opini BPK | WTP |
| | | Penyelesaian Tindaklanjut Temuan | 95% |
| | | Predikat Nilai EPPD | Tinggi |
| | | Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD | 84% |

Jumlah APBDP Tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.321.625.969,76 yang terdiri dari :
 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 537.900.064.661,82 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 662.421.561307,94

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



HERMI HARIYANTO, SE



LAMPIRAN II



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TAHUN 2018

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2018

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI |
|-------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| MISI I : | | | | |
| MENIN | | | | |
| 1. | Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas Guna | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | 80,07% | 72,71% |
| | | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (%) | 29,58% | 30,29% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Menunjang Kedaulatan Pangan | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%) | 74,45% | 77,56% |
| 3. | Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai RTRW Kabupaten | Persentase Kesesuaian Pembangunan Terhadap Tata Ruang | 100% | 100% |
| 4. | Mengurangi Kawasan Kumuh Pada Permukiman Padat Penduduk | Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh | 5,11% | 5,16% |
| 5. | Meningkatnya Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air | Persentase Ketersediaan Terminal Tipe C | 9,09% | 0% |
| | | Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik | 45% | 43% |
| | | Persentase Penurunan Kecelakaan Darat | 0,11% | 0,19% |
| | | Persentase Penurunan Kecelakaan Air | 0,05% | 0,087% |
| MISI II : | | | | |
| MENIN | | | | |
| 1. | Meningkatnya Produksi Tanaman Padi | Provitasi Tanaman Padi (Ton / Ha) | 4,20 Ton/Ha | 4,32 Ton/Ha |
| 2. | Meningkatnya Produksi Tanaman Palawija | Provitasi Tanaman Jagung (Ton / Ha) | 7,0 Ton/Ha | 6,8 Ton/Ha |
| 3. | Meningkatnya Produksi Tanaman Buah-buahan | Provitasi Tanaman Semangka (Ton / Ha) | 8 Ton/Ha | 3,18 Ton/Ha |
| 4. | Meningkatnya Populasi Ternak | Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Ekor) | 4.089.936 ekor | 4.123.519 ekor |
| 5. | Meningkatnya Produksi Daging | Jumlah Peningkatan Daging Ruminansia (Kg) | 240.642 Kg | 234.802,62 Kg |
| 6. | Meningkatnya Pendapatan Petani | Nilai Tukar Petani / NTUP | 99,30% | 104,73% |
| 7. | Meningkatnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 84,0% | 94,8% |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 79,8% | 94,8% |
| | | Konsumsi Energi (Kkal / Kapita / Hari) | 2.161 (Kkal/Kap/Hari) | 2.371 (Kkal/Kap/Hari) |
| 8. | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 2,04% | 40,07% |
| | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 0,40% | 0,34% |
| 9. | Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan Masyarakat dan Tingkat Konsumsi Ikan | Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%) | 0,47% | 0,30% |
| | | Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg / Kapita) | 34,9 Kg/Kapita | 39,51 Kg/Kapita |
| 10. | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Skim Pembiayaan Yang Mudah, Cepat dan Terjangkau Bagi Koperasi dan UMKM | Jumlah IKM Yang Produktif | 1.000 IKM | 668 IKM |
| | Meningkatnya Destinasi Pariwisata Yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2,0% | 1,8% |
| 11. | Meningkatnya Atlet Yang Berkualitas dan Berprestasi | Peringkat POPDA | Peringkat 4 | Peringkat 7 |
| MISI III : | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | APM SD / Sederajat | 97,11% | 97,51 |
| | | APM SMP / Sederajat | 84,26% | 84,26% |
| | | APK SD / Sederajat | 112,95% | 111,76% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI |
|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | APK SMP / Sederajat | 92,31% | 98,46% |
| | | Angka Melek Huruf | 97,38% | 98,49% |
| | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7 Th | 6,38 Th |
| | | Harapan Lama Sekolah | 11,34 Th | 11,80 Th |
| 2. | Meningkatnya Sarana Pendidikan Dasar | Persentase Rasio Ideal Rombel SD | 89,25% | 90,25% |
| | | Persentase Rasio Ideal Rombel SMP | 98,11% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 65,55 Th | 65,69 Th |
| | | Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) | 21,00/1.000 KH | 21,99/1.000 KH |
| | | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) | 21,50/1.000 KH | 21,92/1.000 KH |
| | | Jumlah Kematian Ibu | 5 | 4 |
| | | Prevalensi Kekurangan Gizi (Standar WHO, 2005) | 0,56% | 0,63% |
| | | Cakupan Penemuan dan Penganan TBParu BTA+ | 80% | 58,30% |
| | | Prevalensi Penyakit Kusta | 2,5 /1000 | 2 /1000 |
| 4. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas | Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan | 9 | 10 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 40% | 55% |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | 23,0% | 21,9% |
| | | Persentase Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi | 47,00% | 64,70% |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Jumlah Penduduk Dengan Potensi Wilayah | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 0,78% | 0,78% |
| 6. | Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan Diberbagai Bidang Kehidupan | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Usaha Ekonomi | 60% | 60% |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 60% | 55,64% |
| | | Indeks Pembangunan Gender | 61,31% | 60% |
| 7. | Tersedianya Akses Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi, Pengetahuan dan | Cakupan Desa / Kelurahan Terhadap Akses Internet | 80% | 85% |
| | | Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis IPTEK | 75% | 80% |
| MISI IV | | | | |
| 1. | Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Masyarakat | Indeks Kebebasan Berkeyakinan | 93,85% | 87,69% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Seni Budaya Masyarakat | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni | 1 | 1 |
| 3. | Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik dan Hukum | Indeks Demokrasi Indonesia | 76% | 90,86% |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Dari Bencana Kebakaran | Persentase Cakupan Layanan Kebakaran | 90% | 100% |
| 5. | Meningkatnya Pengamalan Ideologi Pancasila, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Terhadap Masyarakat | Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi | 2 | 1 |
| 6. | Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Lahan dan Tapal Batas | Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan | 80% | 100% |
| MISI V | | | | |
| 1. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang Melayani Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B |
| 2. | Meningkatnya Manajemen Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik | 75,34% | 100% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI |
|-----|--|--|-------------|-----------|
| 3. | Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Kondisi dan Karakteristik Daerah | Nilai Investasi (Dalam Juta Rupiah) | 33.075 | 760.848 |
| 4. | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas | Nilai SAKIP | B | CC |
| | | Opini BPK | WTP | WTP |
| | | Penyelesaian Tindaklanjut Temuan | 95% | 100% |
| | | Predikat Nilai EPPD | Tinggi | Nn |
| | | Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD | 84% | 84% |

Jumlah APBDP Tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.321.625.969,76 yang terdiri dari :
 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 537.900.064.661,82 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 662.421.561307,94

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO, SE

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2018 | REALISASI |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|-----|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|

**CAPAIAN (%)
TERHADAP
TARGET 2018**

| |
|---------|
| |
| 90,81% |
| 102,40% |
| 104,18% |
| 100% |
| 100,98% |
| 0% |
| 95,56% |
| 57,89% |
| 57% |
| |
| 102,9% |
| 97,43% |
| 39,8% |
| 100,8% |
| 97,6% |
| 105,47% |
| 112,9% |
| 118,8% |
| 110% |
| 1964,2% |
| 85,0% |
| 74,64% |
| 113,21% |
| 66,80% |
| 90,0% |
| 57,14% |
| |
| 100,41% |
| 100% |
| 98,95% |

| CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2018 |
|---|
| 106,66% |
| 101,14% |
| 97% |
| 104,1% |
| 101% |
| 102% |
| 100,2% |
| 95,49% |
| 98,08% |
| 125% |
| 112,50% |
| 73% |
| 80% |
| 111% |
| 138% |
| 95,3% |
| 137,7% |
| 100% |
| 100% |
| 93% |
| 98% |
| 106% |
| 106,7% |
| |
| 93,44% |
| 100% |
| 120% |
| % |
| 100% |
| 125% |
| |
| 100% |
| 133% |

| CAPAIAN (%) TERHADAP TARGET 2018 |
|---|
| 2300,37% |
| 90% |
| 100% |
| 105% |
| Nn |
| 100% |

**CAPAIAN (%)
TERHADAP
TARGET 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN II



**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
TAHUN 2018**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2018

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2017 |
|--|--|--|--|
| MISI I : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN | | | |
| 1. | Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas Guna Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | 80,07% |
| | | Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (%) | 29,58% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Menunjang Kedaulatan Pangan | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%) | 74,45% |
| 3. | Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai RTRW Kabupaten | Persentase Kesesuaian Pembangunan Terhadap Tata Ruang | 100% |
| 4. | Mengurangi Kawasan Kumuh Pada Permukiman Padat Penduduk | Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh | 5,11% |
| 5. | Meningkatnya Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi Darat Maupun Air | Persentase Ketersediaan Terminal Tipe C | 9,09% |
| | | Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik | 45% |
| | | Persentase Penurunan Kecelakaan Darat | 0,11% |
| | | Persentase Penurunan Kecelakaan Air | 0,05% |
| MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGROBISNIS, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INVESTASI INDUSTRI, KEPARIWISATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (MARITIM) | | | |
| 1. | Meningkatnya Produksi Tanaman Padi | Provitas Tanaman Padi (Ton / Ha) | 4,20 Ton/Ha |
| 2. | Meningkatnya Produksi Tanaman Palawija | Provitas Tanaman Jagung (Ton / Ha) | 7,0 Ton/Ha |
| 3. | Meningkatnya Produksi Tanaman Buah-buahan | Provitas Tanaman Semangka (Ton / Ha) | 8 Ton/Ha |
| 4. | Meningkatnya Populasi Ternak | Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Ekor) | 4.089.936 ekor |
| 5. | Meningkatnya Produksi Daging | Jumlah Peningkatan Daging Ruminansia (Kg) | 240.642 Kg |
| 6. | Meningkatnya Pendapatan Petani | Nilai Tukar Petani / NTUP | 99,3 |
| 7. | Meningkatnya Diversifikasi dan Keamanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 84,0% |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 79,8% |
| | | Konsumsi Energi (Kkal / Kapita / Hari) | 2.161 (Kkal/Kap/Hari) |
| 8. | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 2,04% |
| | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 0,4% |
| 9. | Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan Masyarakat dan Tingkat Konsumsi Ikan | Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%) | 0,47% |
| | | Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg / Kapita) | 34,9 Kg/Kapita |
| 10. | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Skim Pembiayaan Yang Mudah, Cepat dan Terjangkau Bagi Koperasi dan UMKM | Jumlah IKM Yang Produktif | 1.000 IKM |
| | | Meningkatnya Destinasi Pariwisata Yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saing | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan |
| 11. | Meningkatnya Atlet Yang Berkualitas dan Berprestasi | Peringkat POPDA | peringkat 4 |
| MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENERAPAN IPEK | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | APM SD / Sederajat | 97,11% |
| | | APM SMP / Sederajat | 84,26% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2017 |
|-----|--|---|----------------|
| | | APK SD / Sederajat | 112,95% |
| | | APK SMP / Sederajat | 92,31% |
| | | Angka Melek Huruf | 97,38% |
| | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7 Th |
| | | Harapan Lama Sekolah | 11,34 Th |
| 2. | Meningkatnya Sarana Pendidikan Dasar | Persentase Rasio Ideal Rombel SD | 89,25% |
| | | Persentase Rasio Ideal Rombel SMP | 98,11% |
| 3. | Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 65,55 Th |
| | | Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) | 21,00/1.000 KH |
| | | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) | 21,50/1.000 KH |
| | | Jumlah Kematian Ibu | 5 |
| | | Prevalensi Kekurangan Gizi (Standar WHO, 2005) | 0,56% |
| | | Cakupan Penemuan dan Penganan TBParu BTA+ | 80% |
| | | Prevalensi Penyakit Kusta | 3 /1000 |
| 4. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas | Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan | 9 |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 40% |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | 23,0% |
| | | Persentase Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi | 47,00% |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Jumlah Penduduk Dengan Potensi Wilayah | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 0,78% |
| 6. | Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan Diberbagai Bidang Kehidupan | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Usaha Ekonomi | 60% |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 60% |
| | | Indeks Pembangunan Gender | 61,31 |
| 7. | Tersedianya Akses Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi, Pengetahuan dan Keterampilan Berbasis IPTEK | Cakupan Desa / Kelurahan Terhadap Akses Internet | 80% |
| | | Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Keterampilan Berbasis IPTEK | 75% |

MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, DAN BERBUDAYA SERTA KEAMANAN DAERAH YANG KONDusif

| | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Masyarakat | Indeks Kebebasan Berkeyakinan | 93,85 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Seni Budaya Masyarakat | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni | 1 |
| 3. | Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, Kesadaran Politik dan Hukum | Indeks Demokrasi Indonesia | 76% |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Dari Bencana Kebakaran | Persentase Cakupan Layanan Kebakaran | 90% |

| | | | |
|----|--|--|-----|
| 5. | Meningkatnya Pengamalan Ideologi Pancasila, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Terhadap Masyarakat | Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi | 2 |
| 6. | Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Lahan dan Tapal Batas | Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan | 80% |

MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN DEMOKRATIS

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2017 |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang Melayani Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B |
| 2. | Meningkatnya Manajemen Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik | 75,34% |
| 3. | Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Kondisi dan Karakteristik Daerah | Nilai Investasi (Dalam Juta Rupiah) | 33.075 |
| 4. | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja serta Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efisien | Nilai SAKIP | B |
| | | Opini BPK | WTP |
| | | Penyelesaian Tindaklanjut Temuan | 95% |
| | | Predikat Nilai EPPD | Tinggi |
| | | Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD | 84% |

Jumlah APBDP Tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.321.625.969,76 yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 537.900.064.661,82 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 662.421.561.307,94

BUPATI TANJUNGPINING TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE